

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew young School of policy Studies. Pettersen E. Jhon.1999: *Subnational Debt, Borrowing Process and Credit Worthiness*. Word Bank.
- BAKM.1999. *Laporan Akhir studi/Analisa Komperatif Kinerja PDAM (Periode 1992-1996)*. Jakarta : Badan Anarisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI.
- Lewis. 2001. *Local Government Borrowing and Repayment in Indonesia: Does Fiscal Capacity Matter ?* Desember
- Davey 1983. *Financing Regional Government: International practices and Their Rerevance to the Third world*. University of Birmingham: Institute of Local Government studies.
- Emi dan Ika. 2002. *Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Atonom*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 6, No.1.Publikasi Ilmiah Pusat Statistik dan Peneritian, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI. Maret.
- Maria dan Benjamin.1998: *Subnational Acces to the Capital Markets: The Latin American Experience*.
- Hirawan dan Tim Biro Anarisa Keuangan Daerah. 1985. *Analisa Atas Pelaksanaan Pinjaman Daerah*. Jakarta: Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Departemen Keuangan RI.
- Kadjatmiko,dkk.2004. *Tinjauan pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, DepartemenKeuangan RI, 2004.
- Kepmendagri Nomor: 690.900-327/tgg4 tanggal 10 Mei 1994 *tentang Pedoman Penilaian dan pemantuan Kinerja Keuangan PDAM*.
- Keputusan Bersama Menterr Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas No. 48 tanggal 27 Januari 1987 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas Nomor 185 / KMK.03 / 1995 dan Nomor KEP. 031 / KET/ 5/ 1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tatacara perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan dan pemantauan pinjaman / Hibah Luar Negeri Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas Nomor 459 / KMK./03/ 1999 dan Nomor KEP.264 / KET/ 09 / 1999 tanggal 29 september 1999 tentang perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas Nomor 195 / KMK .03/ 1995 dan Nomor KEP. 031 / KET / S / 1995 tentang Tatacara perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan dan pemantauan pinjaman / Hibah Luar Negeri Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
- Makmun dan Setiawan.2005. *Belajar dari Pengalaman Jepang Dalam Menerbitkan Obligasi Ritel. Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004*. Jakarta. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan RI.
- Makmun.2000. *Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendanaan Daerah Dalam Era Desentralisasi*. Jurnal Kajian 'Ekonomi dan Keuangan, tahun IV, No.4. Publikasi Ilmiah Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan RI.
- Nurwandono, Paulus.2005. *Penerbitan Obligasi dan Ketertibatan Sektor swasta Dalam pembiayaan Daerah*. Bahan presentasi yang disampaikan dalam seminar prospek dan peluang obligasi daerah bagi keberhasilan pembangunan di daerah yang diselenggarakan BPPK. Juli.
- Orial, 2002. *Local Government Finance and Bond Markets in Philippines Asian Development Bank*.
- Pakpahan, 2004. *Pinjaman Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*. Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal. Jakarta. DJAPK, Departemen Keuangan RI.
- Pakpahan, dan Tim Biro Anarisa Keuangan Daerah. 2000. *Laporan Akhir: Analisis Terhadap pengembalian pinjaman pemerintah Daerah dan BMN*. Jakarta, BAKM, Departemen Keuangan. Maret.

- Sidik, 2002. *Local Government Financing of Capital Development: Towards a Market-Based Approach*. Directorate General Fiscal Balance Ministry of Finance, June
- Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tanggal 15 oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri No 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
- Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat , Propinsi dan Kabupaten

Riphat, Singgih dan Parluhutan Hutahaean.1997. *Strategi pemantapan Keuangan Daerah dan Kebijakan Desentralisasi: Suatu Analisis tentang pinjaman Daerah sebagai Arternatif Pembiayaan*

